



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 616 /II.01/HK/2019

### TENTANG

#### **TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024 TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan tahun 2019-2024, maka dipandang perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2019-2024 Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan Tahun 2019-2024 Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Dalam hal pimpinan definitif belum terbentuk, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan dalam bentuk uang sebesar :  
Rp. 7.000.000,- x 50 orang x 12 bulan = Rp. 4. 200.000.000,-  
(empat miliar dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Dalam hal pimpinan definitif sudah terbentuk, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan dalam bentuk uang sebesar :  
Rp. 7.000.000,- x 49 orang x 12 bulan = Rp. 4. 116.000.000,-  
(empat miliar seratus enam belas juta rupiah);
- KEEMPAT** : Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan/atau diktum ketiga tidak diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan;
- KELIMA** : Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan/atau Diktum Ketiga dibayarkan terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/37/II.01/HK/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Sept 2019  
**Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selata
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.